

RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025-2029



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUKAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunianya kami dapat menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis ini secara garis besarnya mengupas Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029. Didalam Rencana Strategis ini diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik menyesuaikan dengan perkembangan saat ini hingga ke depan.

Rencana Strategis merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai unsur Pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai implementasi dari RPJMD 2025 – 2029 serta dapat mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Demikian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk menjadi arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai unsur Pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 10

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 10

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 14

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... 35

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 36

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 36

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah..... 47

BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 62

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 62

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 62

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029..... 65

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 69

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 79

4.1 Uraian Program..... 79

4.2 Uraian Kegiatan..... 79

4.3 Uraian Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 80

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 116

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ... 118

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah ... 121

BAB V PENUTUP..... 126

Kesimpulan..... 126

Kaidah Pelaksanaan 127

Pengendalian dan Evaluasi..... 128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10
Tabel 2.2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	11
Tabel 2.2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan	11
Tabel 2.2.3	Data Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	11
Tabel 2.2.4	Data Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Pangkat dan Golongan	11
Tabel 2.2.5	Data Pejabat Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	12
Tabel 2.2.6	Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	12
Tabel 2.2.7	Data Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel 2.3.2.1	Jumlah Kejadian Konflik dan Gejolak	20
Tabel 2.3.2.2	Data Kejadian Unjuk Rasa	21
Tabel 2.3.2.3	Data Capaian Kinerja	21
Tabel 2.3.2.4	Data Pantauan kasus Penyakit Masyarakat	22
Tabel 2.3.2.5	Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar	22
Tabel 2.3.2.6	Data Capaian Kinerja	23
Tabel 2.3.2.7	Data Tingkat Partisipasi Pemilu	24
Tabel 2.3.2.8	Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Periode 2019-2024	25
Tabel 2.3.2.9	Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Periode 2024-2029	26

Tabel 2.3.2.10	Data Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26
Tabel 2.3.3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini s/d target jangka menengah dokumen perencanaan strategis	27
Tabel 2.3.4.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Layanan Perangkat Daerah	29
Tabel 2.3.4.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 2.5.1.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	32
Tabel 2.5.2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	36
Tabel 2.5.3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri	37
Tabel 2.5.3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Strategis K/L	38
Tabel 2.5.4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim	40
Tabel 2.5.4.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Strategis Provinsi	40
Tabel 2.6.4.1	Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara	47
Tabel 2.1	Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	47
Tabel 3.1.1	Tujuan Perangkat Daerah	55
Tabel 3.2.1	Sasaran Perangkat Daerah	56

Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah	57
Tabel 3.4	Penahapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis PD	63
Tabel 3.5.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	66
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis PD	81
Tabel 4.3.	Rencana/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	87
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	105
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama PD	107
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci PD	109
Tabel 4.6.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	110



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Drs. Awang Sabran, Bc. Hk. Nomor G.3 Telp (0541) 661518 Fax (0541) 662602

Website kesbangpol.kukarkab.go.id Email: kesbangpol@kukarkab.go.id Kode Pos 75514

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : SK-02/BKBP/SET-II/800/01/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 – 2029
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2029;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

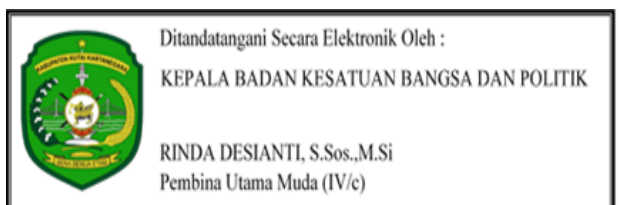
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029. Dengan susunan Personil Tim seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama adalah
1. Menyiapkan bahan/data dari bidang guna mendukung kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Menyiapkan dan merumuskan program Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Mengadakan Rapat Tim untuk penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Menyusun Laporan Hasil Rapat;
 5. Membuat Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Tenggarong
Pada tanggal : 06 Januari 2025



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : SK-02/BKBP/SET-II/800/01/2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2025 – 2029.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Badan	Pengarah	
2	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3	Perencana Ahli Muda	Ketua	
4	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
5	Kabid. Ket. Ekososbud	Anggota	
6	Kabid. Idiologi dan Wasbang	Anggota	
7	Kabid. Politik Dalam Negeri	Anggota	
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
11	Sri Agus Mardiansyah,S.Sos	Anggota	
12	Irhamni,S.IP	Anggota	
13	Darmadian Nur	Anggota	
14	Mugni	Anggota	
15	Zaini Ma'ruf	Anggota	
16	Juminah.HR	Anggota	
17	Yeni	Anggota	
18	Faridah	Anggota	

Ditetapkan di: Tenggarong
Pada tanggal : 06 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan urusan Pemerintahan sebagai Unsur Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang berfungsi sebagai wujud koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, baik antar perangkat daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029.

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai dengan pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh terhadap realisasi pencapaian target dan sasaran yang terdapat pada Rencana Strategis yang terdahulu, dimana terdapat beberapa realisasi yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, baik dari internal maupun eksternal, sehingga dilakukan proses terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilantik pada tanggal 23 Juni 2025. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

RPJMD merupakan suatu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih terarah sesuai dengan dinamika perubahan yang ada saat ini, tentunya hal ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI serta meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya. Hal ini memiliki keterkaitan dengan RPJMD yaitu terkait hal meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani, kemudian juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program Nasional dan Provinsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat serta peningkatan kualitas Demokrasi di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2021 – 2024 telah memberikan hasil dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi sebagai tugas kedepan.

Permasalahan mendasar tersebut adalah potensi konflik lahan, penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup tinggi, tata ruang dan degradasi lingkungan, infrastruktur dan energi serta masalah pendidikan dan kesehatan, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan akses dalam penciptaan iklim yang kondusif.

Sebagai langkah tidak lanjut hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Rencana Strategis yang ada sampai tahun berjalan serta mengikuti proses RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029, kemudian terdapat perubahan terhadap sasaran yang akan dicapai beserta indikator oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar bisa menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, terutama perubahan Peraturan Perundang-Undangan terkait perencanaan dan penganggaran daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum mencakup :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;

5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Tentang Ormas;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 - 2029;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2045;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 – 2042;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029;
30. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang unsur Pemerintahan Umum untuk mewujudkan visi dan misi daerah dan target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 kedalam rencana aksi yang lebih konkrit, menjalankan tugas, fungsi dan mencapai sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam konstitusi menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 dalam urusan Pemerintahan Umum, ke dalam arah kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 – 2029;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan prioritas program dan kegiatan urusan Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahunnya melalui rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif;
3. Mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan merumuskan permasalahan dan isu strategis unsur Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
4. Menetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 5 (lima) tahun ke depan;
5. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
6. Sebagai tolok ukur untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja dan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 ini terdiri dari 5 (lima) bagian sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat:

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, memuat :

- 3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan, memuat :

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup, memuat :

Kesimpulan

Kaidah Pelaksanaan

Pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan unsur penting dalam perencanaan layanan perangkat daerah untuk memahami kondisi riil paling mutakhir dari organisasi dalam penyusunan Rencana Strategis sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual, khususnya menyangkut sumber daya internal organisasi dan kinerja layanan yang telah dicapai.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah, di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

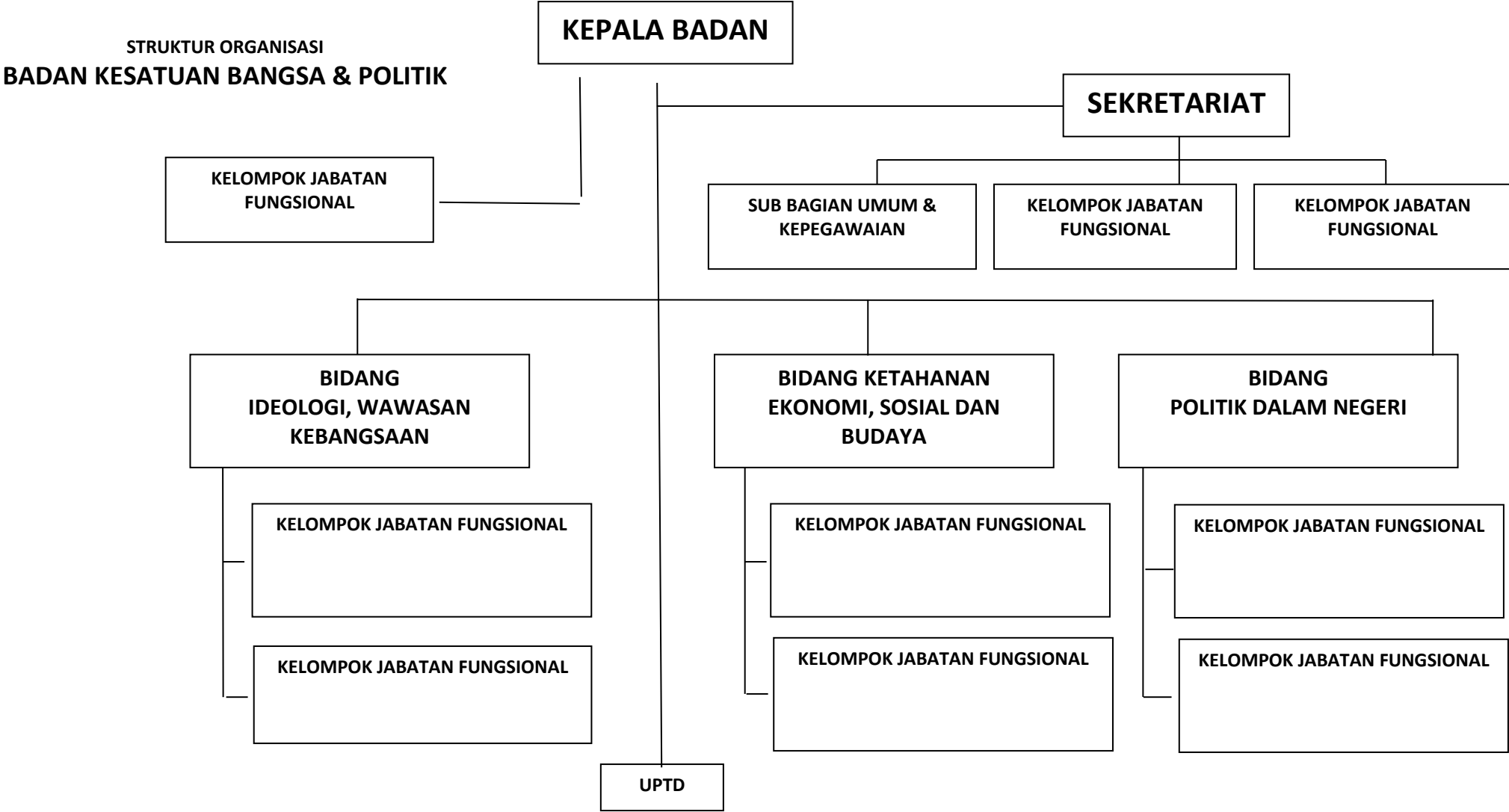
Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis Badan.

TABEL 2.1.1 BAGAN STRUKTUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara per 1 Juli 2025 berjumlah 81 orang ASN yang terdiri dari 59 orang PNS dan 22 orang PPPK, 5 Pejabat Struktural (1 pejabat telah pensiun dan belum ada pengganti) 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 3 Jabatan Administrator dan 1 Jabatan Pengawas serta 54 Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Pelaksana. Sedangkan PPPK berjumlah 22 orang. Data ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan dan Pangkat/Golongan dapat disampaikan sebagai berikut :

TABEL 2.2.1 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Gol IV			Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah PNS
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	S2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	S1	-	-	-	5	3	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	22
3.	Diploma III	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	SLTA	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	27	-	-	-	-	32
Jumlah		3	1	1	5	5	4	9	2	-	1	27	-	-	-	-	59

Sumber data : Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol

TABEL 2.2.2 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Data	Gol IV			Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah PNS
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D	
1.	PNS	3	1	1	5	5	4	9	2	-	1	27	-	-	-	-	59
Jumlah		3	1	1	5	5	4	9	2	-	1	27	-	-	-	-	59

Sumber data : Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol

TABEL 2.2.3 DATA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Gol IX	Gol V	Jumlah
1.	S1	10	-	10
2.	SLTA	-	12	12
Jumlah		10	12	22

Sumber data : Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol

TABEL 2.2.4 DATA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Data	Gol IX	Gol V	Jumlah PPPK
1.	PPPK	10	12	22
Jumlah		10	12	22

Sumber data : Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol

TABEL 2.2.5 DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JABATAN STRUKTURAL				
		ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	S2	1	1	2	-	4
2.	S1	-	-	-	1	1
Jumlah		1	1	2	1	5

Sumber data : Bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol

Selain dari data diatas, kami sampaikan hasil dari analisis jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 2.2.6 DATA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

No	KODE JABATAN	NAMA JABATAN	KELAS JAB.	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1	8101	KEPALA BADAN	14	1	1		
2	810101	SEKRETARIS	12	1	1		
3	81010101	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1	1		
4	8101010101	JF Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	1	
5	8101010102	JF Arsiparis Terampil	5	0	1	1	
6	8101010103	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1		
7	8101010104	Penata Layanan Operasional	7	0	2	2	
8	8101010105	Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	2	
9	8101010106	Pengolah Data dan Informasi	6	5	5		
10	8101010107	Pengadministrasi Perkantoran	5	4	5	1	
11	81010102	JF Perencana Ahli Muda	10	1	1		
12	81010103	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	0	1	1	
13	81010104	JF Perencana Ahli Pertama	8	0	1	1	
14	81010105	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	0	1	1	
15	81010106	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4		
16	81010107	Penata Layanan Operasional	7	0	2	2	
17	81010108	Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	2	
18	81010109	Pengolah Data dan Informasi	6	7	7		
19	81010110	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	2	1	
20	810102	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN	11	1	1		
21	81010201	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1	2	1	
22	81010202	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	2	
23	81010203	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3		
24	81010204	Penata Layanan Operasional	7	0	4	4	
25	81010205	Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	2	
26	81010206	Pengolah Data dan Informasi	6	6	6		
27	81010207	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2		
28	81010208	Operator Layanan Operasional	5	1	1		

29	810103	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	11	1	1		
30	81010301	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	2	1	
31	81010302	JF Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	2	
32	81010303	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	5		
33	81010304	Penata Layanan Operasional	7	0	3	3	
34	81010305	Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	2	
35	81010306	Pengolah Data dan Informasi	6	5	5		
36	81010307	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2		
37	810104	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	11	1	1		
38	81010401	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	2	1	
39	81010402	JF Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	2	2	
40	81010403	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2		
41	81010404	Penata Layanan Operasional	7	0	3	3	
42	81010405	Pengelola Layanan Operasional	6	0	2	2	
43	81010406	Pengolah Data dan Informasi	6	6	6		
44	81010407	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2		
45	810105	JF Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	3	3	
		JUMLAH		66	109	43	0

Sumber data : SK Bupati ttg Anjab ABK Badan Kesbangpol

Secara umum dalam menjalankan tugas pokok perlu didukung dengan sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik. Adapun sarana dan prasarana pendukung yang dipandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut

1. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Secara kebutuhan masih terdapat kekurangan sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Adapun gambaran sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

**TABEL 2.2.7 DATA SARANA DAN PRASARANA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

No	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah yang Tersedia
1	Station Wagon	7	5
2	Sepeda Motor	17	17
3	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	1
4	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	5	5
5	Mesin Ketik Listrik	2	1
6	Mesin Ketik	10	7
7	Lemari Besi/Metal	80	50
8	Lemari Kayu	5	1
9	Rak Besi	10	4
10	Filing Cabinet Besi	50	24
11	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2	2
12	Locker	9	9
13	Laci Box	8	8
14	Lemari Kaca	1	1
15	Lemari Makan	1	1
16	Alat Penghancur Kertas	7	3
17	Mesin Absensi	2	2
18	Meja Resepsionis	2	2
19	Meja Rapat	5	5
20	Tempat Tidur Kayu	2	2
21	Kursi Rapat	8	8
22	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	1
23	Mesin Cuci	8	8
24	Lemari Es	9	9
25	A.C. Split	38	38
26	Rice Warmer (Rak Kaca)	1	1
27	Televisi	14	14
28	Loudspeaker	9	9
29	Sound System	2	1
30	Microphone Floor Stand	2	1
31	Tangga Aluminium	2	2
32	Dispenser	14	14
33	Gordyin/Kray	100	100
34	Bracket Standing Peralatan	1	1
35	Alat Rumah Tangga Lain-lain (tralis)	1	1
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Canopy)	1	1
37	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1
38	Hidran Kebakaran	5	1
39	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	5	1
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II/III/IV	18	18
41	Meja Kerja Pejabat lain-lain	30	30
42	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	1
43	Meja Rapat Pejabat lainnya	21	21
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon II/III/IV	14	14
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	100	100
46	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	4
47	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2	2
48	Kursi Rapat Ruangan Data	4	4
49	Kursi Rapat Pejabat lainnya	32	32

50	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	3
51	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	2	2
52	Kursi Tamu di Ruang Pejabat lainnya	1	1
53	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	6
54	peralatan studio audio lainnya (dst)	3	3
55	Camera Electronic	3	3
56	Slide Projector	7	7
57	Video Conference	1	1
58	Alat Studio Video Lainnya (Handycam)	2	2
59	Mesin Jilid	1	1
60	Mesin Potong (Rumput)	1	1
61	Mesin Barcode	5	5
62	Alat Studio Lainnya (CCTV)	2	2
63	Telephone (PABX)	1	1
64	Handy Talky (HT)	4	4
65	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)- Ipel (HP)	1	1
66	Wireless Amplifier	3	3
67	Tabung 02	1	1
68	Kunci Sinyal	1	1
69	Serial Scanner/Printer	3	3
70	Kipas Penggerak Air	3	3
71	Internet	1	1
72	P.C Unit	50	29
73	Lap Top	35	22
74	Note Book	3	3
75	Hard Disk	8	8
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	29
77	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	20	8
78	Peralatan Fitnes	3	3

Sumber data : Pengurus Barang Pengguna Badan Kesbangpol

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

a. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, fasilitasi organisasi politik, organisasi masyarakat dan kelembagaan partai politik serta pemilihan umum.

Bidang ini melayani surat rekomendasi pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Korespondensi Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan bagi organisasi kemasyarakatan kepada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, baik melalui manual

maupun sistem online. Rekomendasi pemberian hibah dan bansos kepada masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta membantu fasilitasi dan verifikasi bantuan keuangan bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan Surat Keterangan Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik (sebagai persyaratan bagi calon aparat desa)

b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Bidang ini membina forum-forum bentukan pemerintah seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Jejaring Panca Mandala (JPM), Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) selain itu juga melayani pembuatan Surat Rekomendasi Penelitian.

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Bidang ini membina forum-forum bentukan pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan memfasilitasi dalam peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan yang paling utama adalah permasalahan Narkoba.

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis. Sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026, pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai program dukungan terhadap pembangunan daerah meliputi penanganan konflik, melakukan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan Pancasila, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pengaturan database Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik. Untuk data Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020-2021 tidak dapat disajikan karena sudah berbeda uraian dan periode dengan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022-2026 Berikut tabel capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 - 2024

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Rencana Strategis Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
I	INDIKATOR TUJUAN																		
1	Persentase permasalahan ipoleksosbudhankam yang ditindaklanjuti			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA) :																		
1	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak			Kejadian	33	30	28	25	24	28	30	26	14	14	117,86	100	107,69	178,57	171,43
2	Persentase aparaturn dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas			Persen (orang)	1,96 (9.563)	2,37 (11.585)	2,68 (13.085)	2,99 (14.585)	3,33 (16.235)	2,05 (10.026)	2,37 (11.585)	2,90 (14.172)	3,99 (19.478)	5,22 (25.490)	104,59	100	108,21	133,44	156,76
3	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi			Persen (orang)	3,22 (15.716)	4,28 (20.866)	4,40 (21.466)	4,50 (21.966)	5,53 (26.966)	3,23 (15.769)	4,28 (20.866)	4,61 (22.487)	5,71 (27.887)	6,84 (33.390)	100,31	100	104,77	126,89	123,69
III	INDIKATOR PROGRAM:																		
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	81	85	86	87	88	77,83	86,16	95,2	70,98	75,34	96,09	101,4	110,7	81,59	85,61
2	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100
3	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah			Persen (orang)	8,32 (15.716)	11,04 (20.866)	11,36 (21.466)	11,62 (21.966)	14,27 (26.966)	8,34 (15.769)	11,04 (20.866)	11,90 (22.487)	14,76 (27.887)	17,67 (33.390)	100,24	100	104,75	127,02	123,83
4	Persentase aparaturn dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan			Persen (orang)	1,02 (5.000)	1,41 (6.872)	1,59 (7.772)	1,78 (8.672)	1,99 (9.772)	1,12 (5.463)	1,41 (6.872)	1,64 (8.022)	2,19 (10.772)	3,12 (15.222)	109,8	100	103,14	123,03	156,78

5	Persentase aparaturn dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud			Persen (orang)	0,93 (4.563)	0,96 (4.713)	1,09 (5.313)	1,21 (5.913)	1,33 (6.513)	0,93 (4.563)	0,96 (4.713)	1,25 (6.100)	1,77 (8.646)	2.06 (10.036)	100	100	114,68	146,28	154,89
6	Persentase ormas yang tertib administrasi			Persen (ormas)	7,3 (146)	7,9 (158)	8,9 (178)	9,9 (198)	11,4 (228)	7,1 (142)	7,9 (158)	8,8 (176)	9,8 (196)	11,1 (222)	97,26	100	98,88	98,99	97,37
IV	INDIKATOR KEGIATAN:																		
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Dokumen /Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100,00	100
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri			Dokumen /Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100,00	100
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa			Dokumen /Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100,00	100
4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			Dokumen /Triwulan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100,00	100
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Dokumen	16	16	20	20	30	16	17	17	21	27	100	106,3	85	105,00	90
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN														101,74	100,51	102,52	114,72	117,36

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal tahun.

Dalam periode tahun 2020 – 2024 rata-rata tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus meningkat dan telah melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah disampaikan pada tabel diatas, adapun implikasi yang timbul terhadap capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari seluruh pencapaian kinerja masih terdapat kinerja yang mengalami penurunan pada tengah periode
2. Pada capaian yang melebihi target akan dilakukan evaluasi lagi terkait perubahan atau penambahan target kinerja
3. Secara keseluruhan pada capaian Rencana Strategis sudah baik, karena pada periode pertama hingga akhir tingkat capaian terus meningkat
4. Diperlukan penyesuaian terhadap indikator dan satuan target

Dalam capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 – 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 – 2024 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 – 2024 di setiap indikator kinerja :

1. Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak

Tabel 2.3.2.1 Jumlah Kejadian Konflik dan Gejolak

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Konflik dan Gejolak	28	31	26	14	14

sumber data : Bidang Ideologi Wasbang Badan Kesbangpol

Data diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kejadian konflik dan gejolak dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal tahun data

kejadian berada pada angka 28 kejadian dan pada tahun 2024 menjadi 14 kejadian, tentunya hal ini menunjukkan trend penurunan angka kejadian konflik dan gejolak di masyarakat dan dari keseluruhan kejadian tersebut telah dilakukan penanganan bersama dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim Kewaspadaan Dini serta pada tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih harus berupaya untuk melakukan deteksi dini gejolak di masyarakat agar tidak terjadi konflik yang besar, upaya tersebut berupa penyuluhan, pemetaan potensi konflik, analisis kejadian serta peningkatan kapasitas SDM dalam pelaporan dan tindak lanjut penanganan konflik. Selain dari gejolak tersebut juga terdapat upaya masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, berikut kami sampaikan data kejadian unjuk rasa periode 2020 – 2024 :

Tabel 2.3.2.2 Data Kejadian Unjuk Rasa

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejadian Unjuk Rasa	25	29	40	26	27

sumber data : Bidang Ideologi Wasbang Badan Kesbangpol

2. Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas

Tabel 2.3.2.3 Data Capaian Kinerja

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase aparaturn dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Organisasi Kemasyarakatan	2,05 (10.026)	2,37 (11.585)	2,90 (14.172)	3,99 (19.478)	5,22 (25.490)

sumber data : Bidang Ideologi Wasbang dan Bidang Ketahanan Ekososbud Badan Kesbangpol

Dalam indikator ini menunjukkan jumlah aparaturn dan masyarakat yang telah mendapat pemahaman Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Organisasi Kemasyarakatan, data menunjukkan peningkatan jumlah orang setiap

tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini akan terus berlanjut kepada seluruh aparaturnya dan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dampak dari indikator ini secara tidak langsung memberikan pandangan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pelaksanaannya selama ini telah didapat data-data terkait jumlah kasus penyakit masyarakat yang masih cukup tinggi pada setiap tahunnya, untuk itu diperlukan upaya-upaya lebih lanjut dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya kasus penyakit masyarakat.

Tabel 2.3.2.4 Data Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat

No.	Jenis Kriminal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Narkoba	28	224	178	239	214
2	Pembunuhan	3	3	3	-	-
3	Kejahatan Seksual	12	1	3	2	1
4	Penganiayaan	8	22	32	15	13
5	Pencurian	41	17	36	16	11
6	Eksplotasi Anak Bawah Umur	15	24	25	15	8
7	Premanisme	8	0	5	6	4
	JUMLAH	115	291	282	293	274

sumber data : Bidang Ketahanan Ekososbud Badan Kesbangpol

Untuk berikutnya, disampaikan capaian data Organisasi Kemasyarakatan yang telah terdaftar dan melapor kepada Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, data ini menunjukkan progres meningkat setiap tahunnya dan selanjutnya diharapkan jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang melapor akan terus meningkat guna mempermudah pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan tersebut. Meskipun demikian, ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan, selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran Organisasi Kemasyaratannya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas untuk tetap memonitoring dan mengawasi keberadaan Organisasi

Kemasyarakatan yang belum terdaftar di setiap terdapat kegiatan dari Organisasi Kemasyarakatan tersebut, ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganisasi mengalami peningkatan.

Tabel 2.3.2.5 Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	ORMAS	3	4	12	11	8	14	22
2.	OKP	-	-	-	-	4	-	-
3.	LSM	-	2	-	2	-	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	2	3	-	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1	-
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1	-
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5	5
	JUMLAH	8	12	16	19	17	21	27

sumber data : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

3. Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi

Tabel 2.3.2.6 Data Capaian Kinerja

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	3,23 (15.769)	4,28 (20.866)	4,61 (22.487)	5,71 (27.887)	6,84 (33.390)

sumber data : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

Dalam indikator ini menunjukkan jumlah aparatur dan masyarakat yang telah mendapat Pendidikan Politik, data menunjukkan peningkatan jumlah orang setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini akan terus berlanjut kepada seluruh aparatur dan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dampak dari indikator ini secara tidak langsung memberikan pandangan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi yang meliputi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, keterlibatan dalam Partai Politik, dan partisipasi dalam Pemilihan Umum, hal ini dapat diukur pada tingkat partisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilihan Umum periode 2015 – 2024 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak tahun 2024 sebesar 83,84 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 75 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang potensi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilihan Umum ke pelosok Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyentuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil Pemilihan Umum sebelumnya

Inilah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilihan Umum berikutnya. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini masih baik karena masih diatas 50% yang berarti capaian ini harus ditingkatkan lagi.

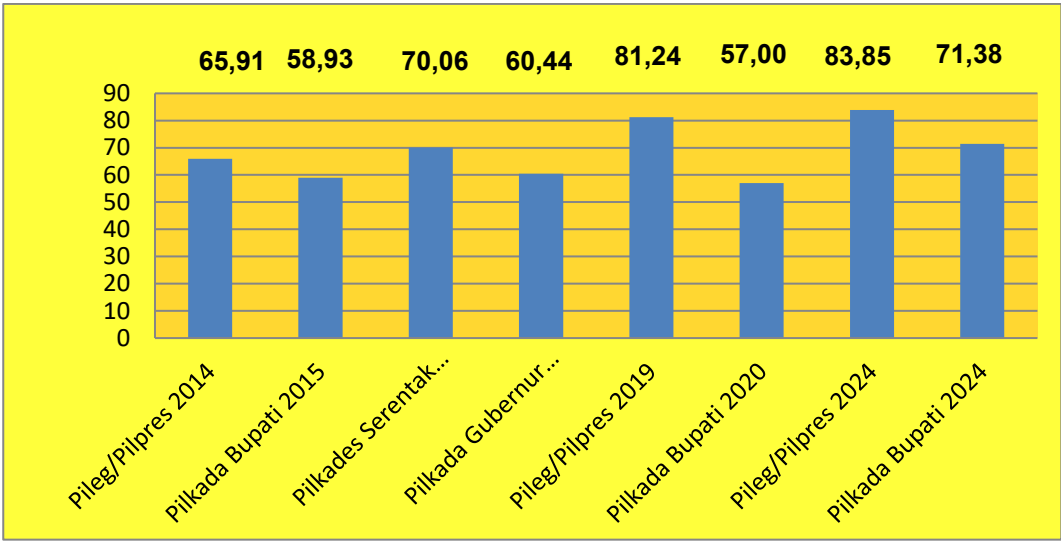
Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan data dan grafik Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sebagai berikut :

Tabel 2.3.2.7 Data Tingkat Partisipasi Pemilu

INDIKATOR	2015	2018	2019	2020	2024	2024
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpres 81,24	Pilbup 57,00	Pileg/Pilpres 83,84	Pilbup 71,38

sumber data : Komisi Pemilihan Umum (diolah)

**GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Selain Pendidikan Politik bagi masyarakat, juga terdapat upaya yang wajib dilakukan oleh Partai Politik terhadap kadernya dan Pemerintah telah memberikan Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.362.024.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.362.024.250,00 atau 100,00 %. Pada tahun 2024 ini pemberian hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pertama diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu tahun 2019 dengan rincian 7/12, nilai 7/12 merupakan bilangan pembagi, dari jumlah bulan periode 2019-2024 yang berakhir pada tanggal 14 Agustus 2024 dan dihitung dari Januari s/d Juli 2024. Kemudian tahap kedua diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu tahun 2024 dengan rincian 5/12, nilai 5/12 merupakan bilangan pembagi, dari jumlah bulan periode 2024-2029 yang dimulai pada bulan Agustus 2024 dan dihitung dari Agustus s/d Desember 2024

Secara keseluruhan untuk Partai Politik berdasarkan hasil evaluasi dilihat bahwa masih ada bendahara Partai Politik yang tidak cermat dalam pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola, hal ini dapat dilihat dari adanya temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban masing-masing Partai Politik, selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap Partai Politik tentang mekanisme dan persyaratan administrasi kegiatan agar bisa tertib.

**Tabel 2.3.2.8 Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Periode 2019 – 2024**

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEMILU 2019	NILAI PERIODE 2019	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	34.286	7/12 x 130.286.800	76.000.650	Lengkap/Realisasi
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	46.667	7/12 x 177.334.600	103.445.200	Lengkap/ Realisasi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	45.361	7/12 x 172.371.800	100.550.250	Lengkap/ Realisasi
4.	Partai Golongan Karya	13	95.345	7/12 x 362.311.000	211.348.100	Lengkap/ Realisasi
5.	Partai Nasional Demokrat	2	20.373	7/12 x 77.417.400	45.160.150	Lengkap/ Realisasi
6.	Partai Keadilan Sejahtera	3	23.250	7/12 x 88.350.000	51.537.500	Lengkap/ Realisasi
7.	Partai Persatuan Indonesia	1	14.340	7/12 x 54.492.000	31.787.000	Tidak Realisasi
8.	Partai Persatuan Pembangunan	1	16.764	7/12 x 63.703.200	37.160.200	Lengkap/ Realisasi
9.	Partai Amanat Nasional	5	34.071	7/12 x 129.469.800	75.524.050	Lengkap/ Realisasi
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	12.410	7/12 x 47.158.000	27.508.850	Lengkap/ Realisasi
JUMLAH		45	342.867	1.302.894.600	760.021.950	

**Tabel 2.3.2.9 Data Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan
Periode 2024 – 2029**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEMILU 2024	NILAI PERIODE 2024	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	29.966	5/12 x 113.870.800	47.446.200	Lengkap/Realisasi
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	59.949	5/12 x 227.806.200	94.919.250	Lengkap/ Realisasi
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16	145.613	5/12 x 553.329.400	230.553.900	Lengkap/ Realisasi
4.	Partai Golongan Karya	9	75.106	5/12 x 285.402.800	118.917.800	Lengkap/ Realisasi
5.	Partai Nasional Demokrat	4	33.849	5/12 x 128.626.200	53.594.250	Lengkap/ Realisasi
6.	Partai Keadilan Sejahtera	2	19.074	5/12 x 72.481.200	30.200.500	Lengkap/ Realisasi
7.	Partai Amanat Nasional	4	36.731	5/12 x 139.577.800	58.157.400	Lengkap/ Realisasi
JUMLAH		45	400.288	1.521.094.400	633.789.300	

sumber data : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol

4. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.3.2.10 Data Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,83	86,16	95,2	70,98	75,34

sumber data : Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari indikator tersebut diatas, bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 hasil capaian mengalami peningkatan, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya terkait dengan pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan, hal ini terkait adanya perubahan regulasi pusat tentang evaluasi SAKIP sehingga dalam hal penilaian terdapat perbedaan dengan regulasi sebelumnya dimana terdapat bobot penilaian yang berubah dan kondisi tersebut telah disesuaikan terhadap laporan SAKIP pada tahun 2024 dan penilaian pada tahun 2024 kembali terdapat peningkatan dari tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Sampai Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Rencana Strategis (Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Sasaran Rencana Strategis Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Rencana Strategis Sampai Tahun 2024
Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	17 kejadian	14 kejadian	100%
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,92 %	5,22%	100%
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,71 %	6,84%	100%

Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara

Anggaran pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2021 – 2024 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sehingga berdampak kepada pencapaian realisasi yang dapat dikategorikan “baik” Dari total anggaran dan realisasinya dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut : Tahun 2017 sebesar 90,98 persen, tahun 2018 sebesar 91,17 persen, tahun 2019 sebesar 91,14 persen, dan tahun 2020 sebesar 89,26 persen. Dilihat dari data tersebut capaian terendah terdapat pada tahun 2020 dan yang tertinggi pada tahun 2018, hal realisasi ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap progres target pencapaian program, karena kegiatan penunjang pencapaian target program hanya bisa dilaksanakan dengan pola minimal, tentunya ini dipengaruhi beberapa faktor yang dimulai anggaran pendanaan yang semakin tahun semakin menurun, realisasi anggaran dan progres pencapaian target program, sebagai berikut :

1. Pengaruh keadaan ekonomi secara global yang cenderung menurun, sehingga berpengaruh pada pendapatan dan bagi hasil untuk Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru dan yang berubah, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian program.
3. Proses/mekanisme penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami gangguan baik secara sistem maupun operasional, sehingga berpengaruh terhadap proses pengajuan dan realisasi anggaran perangkat daerah
4. Adanya faktor eksternal dari pihak instansi vertikal yang menjalankan operasi secara masif khususnya pada kasus penyakit masyarakat
5. Masih belum sinkronnya penjadwalan pelaksanaan kegiatan
6. Adanya tahapan waktu kegiatan yang harus ditepati, sehingga terdapat kegiatan yang terlewat untuk dilaksanakan mengingat tahapan tersebut

sudah melangkah pada tahapan berikutnya, hal ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak.

7. Adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan ditunda pelaksanaan beberapa kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan perangkat daerah pada level program, selanjutnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dianalisis melalui pendanaan pelayanan perangkat daerah melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.4.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rasio		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-5	-6	-10	-11	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung	8.344.850.751,10	8.786.019.770,00	7.067.276.672,00	7.168.787.330,00	84,69	81,59	2,11	2,03
Belanja Pegawai	8.344.850.751,10	8.786.019.770,00	7.067.276.672,00	7.168.787.330,00	84,69	81,59	2,11	2,03
Belanja Langsung	7.264.723.943,40	6.374.390.384,00	6.865.374.494,00	5.604.312.839,00	94,50	87,92	1,75	1,63
Belanja Pegawai	842.864.000,00	164.660.000,00	823.554.600,00	163.670.000,00	97,71	99,40	0,39	0,40
Belanja Barang Jasa	6.191.324.543,40	6.028.968.384,00	5.813.807.894,00	5.260.263.739,00	93,90	87,25	1,95	1,81
Belanja Modal	230.535.400,00	180.762.000,00	228.012.000,00	180.379.100,00	98,91	99,79	1,57	1,58
JUMLAH BL + BTL	15.609.574.694,50	15.160.410.154,00	13.932.651.166,00	12.773.100.169,00	89,26	84,25	1,94	1,83

Tabel 2.3.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Ang	Rea
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.412.173.362,00	11.993.973.109,00	16.559.162.468,00	9.531.902.457,00	10.899.491.663,00	14.371.313.864,00	83,52	90,87	86,79	4,35	4,52
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.650.000.000,00	2.012.630.000,00	8.778.680.000,00	1.452.536.605,00	1.948.079.962,00	7.093.473.122,00	88,03	96,79	80,80	15,96	14,65
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.487.095.800,00	44.517.786.507,00	75.135.281.911,00	3.185.803.349,00	43.195.733.971,00	70.936.300.063,00	91,36	97,03	94,41	64,64	66,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	200.000.000,00	298.000.000,00	700.000.000,00	193.817.000,00	215.500.000,00	599.540.000,00	96,91	72,32	85,65	10,50	9,28
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.458.230.000,00	3.782.286.000,00	2.603.122.200,00	2.341.323.056,00	2.850.290.849,00	2.093.162.395,00	95,24	75,36	80,41	3,18	2,68
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.822.876.500,00	2.777.086.056,00	3.063.010.000,00	1.769.394.904,00	1.877.173.360,00	2.715.249.193,00	62,68	67,60	88,65	3,26	4,60
JUMLAH	22.030.375.662,00	65.381.761.672,00	106.839.256.579,00	18.474.777.371,00	60.986.269.805,00	97.809.038.637,00	83,86	93,28	91,55	14,55	15,88

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki beberapa mitra dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang terdiri dari Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik dan Forum-Forum Bentukan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, adapun bentuk kemitraan sebagai berikut :

1. Instansi Vertikal

Instansi Vertikal yang menjadi mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Pemasyarakatan, Badan Intelijen Negara, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan lembaga lainnya, bentuk kemitraan berupa fasilitasi dan koordinasi kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan di berikan fasilitasi dalam pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Keterangan Lapor (SKL)

3. Partai Politik

Partai Politik di fasilitasi dalam penyaluran Hibah Bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta kerjasama dalam pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Kader Partai

4. Forum-Forum Bentukan Pemerintah

Fasilitasi Forum-Forum Bentukan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan, antarai lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Jejaring Panca Mandala (JPM), PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) bentuk fasilitasi dalam bentuk kegiatan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing forum.

5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka koordinasi sebagai pendukung dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Sub Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini :

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada Bab II, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Rencana Strategis maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5.1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas demokrasi daerah, keamanan dan ketertiban masyarakat yang masih rendah	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	1.Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan Pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3.Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
		Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat

			3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat
		Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi 3. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 4. Masih terdapat Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, serta data yang telah disampaikan pada capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat dijabarkan penjelasan terhadap permasalahan tersebut, diantaranya :

1. Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat

Dalam periode 2020 – 2024, situasi di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif dalam kondisi kondusif, namun dalam periode tersebut masih terdapat kejadian konflik di masyarakat dalam skala kecil dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya pada 2020 terdapat 28 kejadian dan pada tahun 2024 terdapat 14 kejadian, terkait hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan pertanahan masyarakat dan perusahaan, sehingga diperlukan kajian kedepannya terkait permasalahan tersebut.

2. Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Harapan yang tertulis dalam target kinerja telah melebihi dari yang ditargetkan, namun masih terdapat beberapa kasus di kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari belum timbulnya kesadaran pada diri tentang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, hal ini yang masih terus akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama stakeholder terkait untuk lebih lagi dalam memberikan pemahaman terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan berbagai metode dan kelompok sasaran yang beragam dan jangkauan yang lebih jauh lagi, dalam periode 2020 – 2024 telah dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada aparaturnya dan masyarakat sejumlah 25.490 orang, jumlah ini akan terus bertambah dengan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam periode 5 (lima) tahun mendatang

3. Menurunnya kualitas Demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilihan Umum periode 2015 – 2024 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak tahun 2024 sebesar 83,84 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 75 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang potensi Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)

- b. Kurangnya Pendidikan Politik terhadap Aparatur, Kader Partai dan Masyarakat serta belum mencapai pada daerah pelosok Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
- c. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyentuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
- d. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

Selain tingkat partisipasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga harus memberikan Pendidikan Politik dalam hal kegiatan berorganisasi dan cara penyampaian pendapat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada periode tersebut tingkat penyampaian pendapat cenderung menurun, penurunan ini menjadi faktor menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan harus ditingkatkan lagi.

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029 maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

A. Visi

Adapun Visi berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029 yaitu:

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
2. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
3. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

4. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam pelaksanaan misi ke 3 yaitu **“Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara”** Sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempegaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Visi : “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Masih munculnya konflik dan gejala di masyarakat	1.Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3.Lemahnya pengawasan terhadap orang asing,	1. Penguatan terhadap FKDM 2. Peningkatan koordinasi antar instansi vertikal di daerah 3. Pemantauan deteksi dini di daerah rawan konflik 4. Pengawasan terhadap TKA asing

			tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah	
		Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Organisasi Kemasyarakatan	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa Nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 8. Masih terdapat ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari Pemerintah	1. Penyuluhan terhadap masyarakat masih terus berjalan walaupun dengan pola minimal 2. Penyuluhan terhadap pelajar dan pemuda 3. Penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional 4. Pemantauan dampak gejala ekonomi 5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan 6. Penguatan terhadap Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama
		Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Kurangnya pemahaman aparaturnya, kader partai dan masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi 3. Masih terdapat Partai Politik yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana	1. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan sasaran aparaturnya, kader partai dan masyarakat 2. Pembinaan terhadap partai politik 3. Pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah 4. Meningkatkan koordinasi dengan

			bantuan dari Pemerintah	lembaga penyelenggara Pemilu
--	--	--	----------------------------	---------------------------------

Telaahan Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2025 – 2029 (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum)

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) pada tahun 2025 – 2029 adalah : **“Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Stabilitas Politik Berdasarkan Pancasila”**

Dari visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka terdapat misi, tujuan dan sasaran yang memiliki kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 – 2029 tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.5.3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

No.	Misi/Tujuan	Sasaran
1.	Misi : Memperkuat Implementasi Ideologi Pancasila Untuk Menjaga Kebhinekaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri	
	Tujuan : Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	1. Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
		2. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
		3. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Tabel 2.5.3.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Strategis K/L

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	Masih munculnya konflik dan gejala di masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejala	Merupakan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan

			Kutai Kartanegara		kenyamanan lingkungan 2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan Pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
	Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Organisasi Kemasyarakatan	Persentase aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Organisasi Kemasyarakatan	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 8. Masih terdapat Organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana

					bantuan dari pemerintah
	Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Merupakan Tupoksi Badan Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan sasaran pelajar dan pemuda serta masyarakat luas 2. Pembinaan terhadap Partai Politik 3. Pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah 4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu

Telaahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2025 - 2029

Visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 – 2029 telah diselaraskan dengan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2029 adalah : **“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”**

Dari visi tersebut, maka terdapat misi, tujuan dan sasaran yang memiliki kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029 tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.5.4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

No.	Misi/Tujuan	Sasaran
1.	Misi : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	
	Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
	Tujuan 2 :	Sasaran 1 :

	Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
	Tujuan 3 : Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur	Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan
	Tujuan 4 : Terwujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kalimantan Timur	Sasaran 4 : Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur

Tabel 2.5.4.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Strategis Provinsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Di luar Kewenangan OPD)	
Terwujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kalimantan Timur	Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	Merupakan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 3. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah
1. Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar Sekolah	Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila dan	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi

Lanjutan Tingkat Atas yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan 2. Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur	Wawasan Kebangsaan serta Organisasi Kemasyarakatan	an wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Organisasi Kemasyarakatan	Kartanegara		2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat 7. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 8. Masih terdapat Organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah
Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan sasaran pelajar dan pemuda serta masyarakat luas 2. Pembinaan terhadap Partai Politik 3. Pemantauan terhadap perkembangan politik di daerah 4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan identifikasi permasalahan yang ada serta ditinjau dari tugas dan fungsi yang dimiliki, gambaran pelayanan, visi dan misi program Bupati dan Wakil Bupati, sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Provinsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara dapat merumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini.

Isu Strategis Global/Internasional

Isu strategis global adalah masalah atau tantangan yang memiliki dampak luas dan melintasi batas Negara, mempengaruhi komunitas Internasional secara besar-besaran. Karena sifatnya yang global, isu-isu ini membutuhkan perhatian dan tindakan yang melampaui kemampuan satu Negara atau wilayah saja, sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi antar Negara serta organisasi Internasional. Kerja sama ini sangat penting, tidak hanya untuk menangani masalah yang sudah ada, tetapi juga untuk mencegah timbulnya masalah serupa di masa depan, guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Isu global di bidang Ipoleksosbud (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya) mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh suatu negara dalam skala Internasional. Isu-isu ini kompleks dan saling terkait, mempengaruhi stabilitas dan perkembangan suatu bangsa. Berikut adalah beberapa isu global di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya yang memerlukan perhatian :

- **Paham Liberalisme dan Individualisme:**

Masuknya paham liberalisme yang menekankan kebebasan individu dapat menggeser nilai-nilai kolektivitas dan gotong royong dalam masyarakat, serta mendorong gaya hidup konsumtif dan hedonis.

- **Ekstremisme dan Radikalisme:**

Munculnya berbagai gerakan ekstrimis dan radikal yang mengancam nilai-nilai Pancasila dan mengganggu stabilitas negara.

- **Perkembangan Teknologi Informasi:**

Kemudahan akses informasi dan komunikasi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan Ideologi Negara.

- **Intervensi Asing:**

Campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri, termasuk dalam bentuk tekanan Politik, intimidasi dan provokasi yang dapat mengancam kedaulatan Negara.

- **Konflik Perbatasan dan Sengketa Wilayah:**

Konflik perbatasan dan sengketa wilayah dengan Negara tetangga dapat menimbulkan ketegangan Politik dan bahkan konflik bersenjata.

- **Globalisasi Ekonomi:**

Globalisasi ekonomi dapat membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang perdagangan dan investasi. Di sisi lain, globalisasi juga dapat menyebabkan ketergantungan pada Negara lain, ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial.

- **Krisis Ekonomi Global:**

Krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat dengan cepat menyebar ke Negara lain karena saling ketergantungan dalam perekonomian global.

- **Masuknya Budaya Asing:**

Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dapat mengikis identitas budaya suatu Bangsa.

- **Perubahan Sosial:**

Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dapat menimbulkan masalah sosial seperti kesenjangan sosial, kemiskinan dan kriminalitas.

- **Penyalahgunaan Teknologi Informasi:**

Teknologi informasi dapat digunakan untuk menyebarkan konten negatif seperti pornografi, perjudian dan ujaran kebencian.

- **Radikalisme dan Intoleransi:**

Radikalisme dan intoleransi dapat menimbulkan konflik sosial dan mengancam kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok sosial.

- **Terorisme:**

Terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan negara dan dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan ketakutan dalam masyarakat.

- **Kejahatan Lintas Batas Negara:**

Kejahatan Lintas Batas Negara seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan penyelundupan senjata merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban Negara.

Isu Strategis Nasional

Isu strategis jangka menengah Nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMD nantinya akan menjadi implementasi dari RPJMN di tingkat daerah dengan menyesuaikan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah. Isu strategis di tingkat Nasional akan menjadi arah bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan rencana Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan yang sinkron dengan isu strategis Nasional membuat Kabupaten Kutai Kartanegara turut dalam Pembangunan Nasional serta mencapai visi Indonesia Emas 2045. Isu-isu Nasional di bidang Ipoleksosbud (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)

saat ini meliputi berbagai tantangan dan peluang. Di bidang Ideologi, tantangan utama adalah menjaga persatuan dan menangkal radikalisme serta intoleransi. Di bidang Politik, isu penting adalah menjaga stabilitas Politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan memerangi korupsi. Dalam bidang Ekonomi, fokusnya adalah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan dan peningkatan daya saing. Bidang sosial menyoroti isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kualitas pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial. Terakhir, bidang budaya menghadapi tantangan dalam melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur

Isu-isu bidang Ipoeksosbud (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya) di Kalimantan Timur saat ini sangat dinamis, terutama dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Beberapa isu yang muncul meliputi :

Ideologi :

- Potensi perubahan nilai-nilai sosial budaya akibat masuknya penduduk dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda.
- Pergeseran ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa akibat pengaruh budaya luar.

Politik :

- Persaingan politik antar daerah dan antar kelompok kepentingan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
- Potensi konflik horizontal akibat perebutan sumber daya dan kekuasaan.
- Keterlibatan politik praktis dalam pengelolaan Ibu Kota Negara (IKN).

Ekonomi :

- Perubahan struktur ekonomi Kalimantan Timur akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dari berbasis sumber daya alam (SDA) menjadi berbasis jasa dan teknologi.

- Kesenjangan ekonomi antara wilayah Ibu Kota Negara (IKN) dengan wilayah lain di Kalimantan Timur.
- Potensi hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal akibat alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur.
- Ketergantungan ekonomi pada sektor konstruksi selama masa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
- Perkembangan ekonomi yang pesat, namun perlu diiringi dengan pemerataan dan keberlanjutan.

Sosial :

- Perubahan struktur sosial masyarakat akibat migrasi penduduk.
- Potensi konflik sosial akibat perbedaan budaya, agama dan suku.
- Pergeseran norma sosial dan nilai-nilai budaya lokal.
- Peningkatan kriminalitas dan masalah sosial lainnya akibat urbanisasi dan ketidakmerataan pembangunan.
- Perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Budaya :

- Ancaman terhadap pelestarian budaya lokal akibat pengaruh budaya luar.
- Pentingnya menjaga dan mengembangkan seni dan budaya lokal sebagai identitas Kalimantan Timur.
- Pemanfaatan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif.
- Pendidikan dan sosialisasi budaya kepada penduduk baru.

Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara

Setelah menganalisis hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai isu strategis RPJMD 2025 – 2029 yaitu Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi dan perwujudan keamanan

dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi, beberapa isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.6.4.1 Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Dukungan Penerapan <i>Smart Regency</i> dan Infrastruktur Digital	Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan Layanan Jasa Keuangan	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Stabilitas Kondusifitas Daerah	Masih munculnya konflik dan gejala di masyarakat		Radikalisme dan intoleransi dapat menimbulkan konflik sosial dan mengancam kerukunan antarumat beragama dan antar kelompok sosial	Menjaga persatuan bangsa dan menangkal radikalisme serta intoleransi	Potensi konflik sosial akibat perbedaan budaya, agama, dan suku.	Belum optimalnya sistem deteksi dini dalam menghadapi potensi konflik dan gejala di masyarakat yang berasal dari paham radikalisme, terorisme dan intoleransi

Dukungan Forum-Forum Bentukan Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		Masuknya paham liberalisme yang menekankan kebebasan individu dapat menggeser nilai- nilai kolektivitas dan gotong royong dalam masyarakat, serta mendorong gaya hidup konsumtif dan hedonis	Kemiskinan, kesenjangan sosial, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial dan melestarikan nilai- nilai luhur budaya bangsa di tengah arus globalisasi dan modernisasi	Pergeseran ideologi Pancasila dan nilai- nilai luhur bangsa akibat pengaruh budaya luar	Belum maksimalnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap 4 Konsensus Dasar Nasional
Pemberdayaan dan Partisipasi Politik Masyarakat baik secara Individu dan Kelembagaan	Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara		Campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri, termasuk dalam bentuk tekanan politik, intimidasi, dan provokasi, dapat mengancam kedaulatan negara	Menjaga stabilitas politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan memerangi korupsi	Persaingan politik antar daerah dan antar kelompok kepentingan terkait pemindahan IKN	Masih rentannya stabilitas politik dan demokrasi serta terbatasnya pendidikan politik pada aparatur dan masyarakat

Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Belum Optimalnya Sistem Deteksi Dini Dalam Menghadapi Potensi Konflik dan Gejolak di Masyarakat yang Berasal dari Paham Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi

Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah. Diperlukan penguatan analisis hasil deteksi dini dan kesinambungan langkah koordinasi penanganan potensi terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat

B. Belum Optimalnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Dasar Nasional

Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan eksesi dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara serta munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat Bela Negara.

C. Masih Rentannya Stabilitas Politik dan Demokrasi serta Terbatasnya Pendidikan Politik pada Aparatur dan Masyarakat

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum dan Organisasi Kemasyarakatan yang menerapkan kebijakan terbaru, diperlukan langkah penyesuaian dengan kondisi demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian partisipasi politik masyarakat yang telah ada melalui penciptaan iklim demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai upaya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat.

A. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkisme. Disamping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Masih sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan

ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dilindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralisme lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (Negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam pembentukan perannya sebagai "penengah" yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis.

Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga Negara (citizen) bukan sebagai pelanggan (customer). Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

7) Program Pro-Masyarakat

Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

B. Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak kewajiban masyarakat sebagai warga Negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka Tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.

2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kegiatan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap Partai Politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai Politik, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat dan Elemen Masyarakat Lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan :

a. Partai Politik

Partai Politik berperan dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat;

b. Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat

Para Tokoh Politik dan Tokoh Masyarakat diharapkan bisa memberikan teladan kepada masyarakat mengenai tata cara berpolitik yang baik dan berpartisipasi aktif dalam proses Politik.

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam menunjang kinerja SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang lebih spesifik dan terukur. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2029 di tetapkan tujuan sebagai berikut :

TABEL 3.1.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

MISI 3 RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN
Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.	Meningkatnya Stabilitas Kondusifitas Daerah	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Indeks Harmoni Indonesia

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang

akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

TABEL 3.2.1 SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Indek Harmoni Indonesia	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks Kewaspadaan Nasional

Secara keseluruhan tujuan dan sasaran serta indikator dan target pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 – 2029, dapat disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENCANA STRATEGIS PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENCANA STRATEGIS PD
						2024 (realisasi)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Stabilitas Kondusifitas Daerah	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia		Indeks Harmoni Indonesia	nilai	88,29	88,30	88,31	88,32	88,33	88,34	88,35	88,35
			1 Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Indeks Kewaspadaan Nasional	nilai	N/A	N/A	76	77	78	79	80	80

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2025 – 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan strategi penahapan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis Badan Kesbangpol

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Pemenuhan Fondasi Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Pemerataan pembinaan dan pemahaman Pancasila dan demokrasi serta deteksi dini berbasis data Kewilayahan	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Perwujudan Stabilitas Kondusifitas Daerah	Pemantapan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pemenuhan data-data potensi konflik	Perluasan lokus deteksi dini potensi konflik hingga tingkat Desa/Kelurahan	Peningkatan akurasi analisis dan deteksi dini potensi konflik serta penguatan pembinaan dan sosialisasi pencegahan potensi ancaman	Perwujudan penanganan konflik yang diselesaikan	Pemantapan Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Fasilitasi Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Penguatan tata kelola pelaksanaan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	Perluasan lokus pembinaan Pancasila hingga tingkat Desa/Kelurahan	Peningkatan sistem perekrutan dan pembinaan Pancasila terhadap generasi muda	Perwujudan Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemantapan Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Fasilitasi Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	Penguatan regulasi dan tata kelola pembinaan partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat	Peningkatan akurasi data partisipasi politik hingga tingkat RT sebagai bahan pendidikan politik	Peningkatan fasilitasi pendidikan politik terhadap seluruh <i>stakeholder</i>	Perwujudan Etika dan Budaya Politik	Pemantapan Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penguatan regulasi dan tata kelola pembinaan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan akurasi data organisasi kemasyarakatan dan perluasan informasi tentang regulasi organisasi kemasyarakatan	Peningkatan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan	Perwujudan tertibnya organisasi kemasyarakatan	Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	Pemenuhan mutu ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Penguatan analisis ketahanan ekonomi dan pembinaan sosial dan budaya kepada aparatur dan masyarakat	Peningkatan mutu ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Perwujudan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Pemantapan Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Adapun penahapan pembangunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 dijabarkan melalui strategi sebagai berikut :

1. Pemenuhan Fondasi Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Pemenuhan fondasi kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu masing-masing bidang akan melaksanakan pemenuhan data-data potensi konflik, penguatan tata kelola pelaksanaan pembinaan ideologi dan wasbang, penguatan regulasi dan tata kelola pembinaan Partai Politik dan Pendidikan Politik bagi masyarakat, penguatan regulasi dan tata kelola pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, pemenuhan mutu Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

2. Pemerataan Pembinaan dan Pemahaman Pancasila dan Demokrasi serta Deteksi Dini Berbasis Data Kewilayahan

Pemerataan pembinaan dan pemahaman Pancasila dan Demokrasi serta deteksi dini berbasis data Kewilayahan menjadi landasan penting untuk mendorong perluasan kelompok sasaran yang akan menerima secara langsung manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan, kemudian seluruh bidang telah membuat langkah masing-masing terkait hal tersebut meliputi perluasan lokus deteksi dini potensi konflik hingga tingkat Desa/ Kelurahan, perluasan lokus pembinaan pancasila hingga tingkat Desa/Kelurahan, peningkatan akurasi data partisipasi Politik hingga tingkat RT sebagai bahan Pendidikan Politik, peningkatan akurasi data Organisasi Kemasyarakatan dan perluasan informasi tentang regulasi Organisasi Kemasyarakatan, Penguatan analisis Ketahanan Ekonomi dan pembinaan Sosial dan Budaya kepada Aparatur dan Masyarakat.

3. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa diarahkan untuk memperkuat pencegahan potensi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa yang mengarah pada disintegrasi bangsa, upaya ini dilakukan melalui peningkatan akurasi analisis dan deteksi dini potensi konflik serta penguatan pembinaan dan sosialisasi pencegahan potensi ancaman, peningkatan sistem perekrutan dan pembinaan Pancasila terhadap generasi muda, peningkatan fasilitasi pendidikan politik terhadap seluruh stakeholder, peningkatan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan mutu Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4. Perwujudan Stabilitas Kondusifitas Daerah.

Perwujudan Stabilitas Kondusifitas Daerah diarahkan pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil akan menjadi akses terlaksananya pembangunan dan investasi yang aman, dicapai melalui perwujudan penanganan konflik yang diselesaikan, perwujudan Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, perwujudan Etika dan Budaya Politik, perwujudan tertibnya Organisasi Kemasyarakatan, Perwujudan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat.

5. Pemantapan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Pemantapan Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia diarahkan pada terciptanya kehidupan yang harmoni melalui pemantapan Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pemantapan Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, pemantapan Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri, Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pemantapan Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka perlu ditetapkan suatu arah kebijakan rumusan rangkaian pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS PD	KETERANGAN
1	Perbup No. 41	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Pemetaan data potensi konflik	
2			Penataan kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forkopimda	
3			Pengembangan sistem kewaspadaan dan pencegahan konflik	
4			Pemanfaatan jaring agen di tingkat Desa/ Kelurahan	
5			Penguatan data kelembagaan FKDM di seluruh Kecamatan dan Forkopimda	
6			Inventarisasi potensi perkembangan paham radikalisme dan terorisme	
7			Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing	
8			Peningkatan pembinaan dan penyuluhan FKDM dan Forkopimda kepada aparaturnya dan masyarakat	
9			Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat	
10			Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoeksosbudhankam	
11			Akurasi analisis potensi konflik terhadap kebijakan pemerintah	
12			Penguatan peran FKDM dan Forkopimda dalam kehidupan masyarakat	
13			Penerapan sistem kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan ketertiban	
14			Peningkatan keamanan dan ketertiban di masyarakat	
15			Penyusunan metode pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara	
16			Penataan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	

17			Penyusunan petunjuk pelaksanaan rangkaian kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka	
18			Penetapan lokus potensial pembinaan Pancasila	
19			Penguatan data kelembagaan FPK di seluruh Kecamatan	
20			Perluasan informasi pelaksanaan kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka	
21			Peningkatan pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Pancasila kepada aparatur dan masyarakat	
22			Peningkatan pembinaan dan penyuluhan FPK kepada aparatur dan masyarakat	
23			Pelaksanaan rangkaian kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka	
24			Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	
25			Penguatan peran FPK dalam kehidupan masyarakat	
26			Peningkatan peran pasukan pengibar bendera pusaka sebagai Duta Pancasila dalam masyarakat	
27			Peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila	
28			Peningkatan kerukunan antar suku dan intra suku	
29			Implementasi tugas-tugas pasukan pengibar bendera pusaka sebagai Duta Pancasila	
30			Penyusunan skema pendidikan politik dan fasilitasi Partai Politik	
31			Inventarisasi data-data kantong pemilih potensial hingga tingkat RT	
32			Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi seluruh lapisan Masyarakat	
33			Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah	
34			Penguatan kapasitas kelembagaan partai politik	
35			Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu	

36			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik	
37			Peningkatan kehidupan demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	
38			Penyusunan skema pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	
39			Inventarisasi data Organisasi Kemasyarakatan yang belum terdaftar	
40			Penguatan kapasitas dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
41			Pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	
42			Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	
43			Penyusunan data pelaku ekonomi yang berpotensi dalam mendukung ketahanan ekonomi di daerah	
44			Penataan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)	
45			Penyusunan rencana aksi Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Ketahanan Budaya	
46			Penguatan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dampak kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat	
47			Penguatan data kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)	
48			Penyampaian rencana aksi Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Ketahanan Budaya	
49			Peningkatan hasil monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas ketahanan ekonomi	
50			Peningkatan pembinaan dan penyuluhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada aparaturnya dan masyarakat	

51			Implementasi rencana aksi Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Ketahanan Budaya	
52			Akurasi analisis ketahanan ekonomi terhadap kebijakan pemerintah	
53			Penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam kehidupan masyarakat	
54			Penyelesaian rencana aksi Pencegahan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Ketahanan Budaya	
55			Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	
56			Peningkatan toleransi antar umat beragama dan penurunan kasus penyalahgunaan narkotika	

Tabel 3.5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”		
MISI (RPJMD)*	Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara		
TUJUAN (RPJMD)*	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		
SASARAN (RPJMD)*	Meningkatnya Stabilitas Kondusifitas Daerah		
ARAH KEBIJAKAN (RPJMD)*	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah		
Tujuan	SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pemenuhan data-data potensi konflik	1 Pemetaan data potensi konflik
			2 Penataan kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forkopimda
			3 Pengembangan sistem kewaspadaan dan pencegahan konflik
		Perluasan lokus deteksi dini potensi konflik hingga tingkat Desa/ Kelurahan	4 Pemanfaatan jaring agen di tingkat desa/kelurahan
			5 Penguatan data kelembagaan FKDM di seluruh kecamatan dan Forkopimda
			6 Inventarisasi potensi perkembangan paham radikalisme dan terorisme
		Peningkatan akurasi analisis dan deteksi dini potensi konflik serta penguatan pembinaan dan sosialisasi pencegahan potensi ancaman	7 Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
			8 Peningkatan pembinaan dan penyuluhan FKDM dan Forkopimda kepada aparaturnya dan masyarakat

		9	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan konflik dan gejolak di masyarakat
		10	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam
	Perwujudan penanganan konflik yang diselesaikan	11	Akurasi analisis potensi konflik terhadap kebijakan Pemerintah
		12	Penguatan peran FKDM dan Forkopimda dalam kehidupan masyarakat
	Pemantapan Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	13	Penerapan sistem kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan ketertiban
		14	Peningkatan keamanan dan ketertiban di masyarakat
	Penguatan tata kelola pelaksanaan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	15	Penyusunan metode pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara
		16	Penataan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
		17	Penyusunan petunjuk pelaksanaan rangkaian kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka
	Perluasan lokus pembinaan Pancasila hingga tingkat Desa/ Kelurahan	18	Penetapan lokus potensial pembinaan pancasila
		19	Penguatan data kelembagaan FPK di seluruh Kecamatan
		20	Perluasan informasi pelaksanaan kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka
	Peningkatan sistem perekrutan dan pembinaan Pancasila terhadap generasi muda	21	Peningkatan pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan pancasila kepada aparaturnya dan masyarakat

		22	Peningkatan pembinaan dan penyuluhan FPK kepada aparaturnya dan masyarakat
		23	Pelaksanaan rangkaian kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka
	Perwujudan Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	24	Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
		25	Penguatan peran FPK dalam kehidupan masyarakat
		26	Peningkatan peran pasukan pengibar bendera pusaka sebagai Duta Pancasila dalam masyarakat
	Pemantapan Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	27	Peningkatan pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap Pancasila
		28	Peningkatan kerukunan antar suku dan intra suku
		29	Implementasi tugas-tugas pasukan pengibar bendera pusaka sebagai Duta Pancasila
	Penguatan regulasi dan tata kelola pembinaan Partai Politik dan pendidikan politik bagi masyarakat	30	Penyusunan skema pendidikan politik dan fasilitasi Partai Politik
	Peningkatan akurasi data partisipasi politik hingga tingkat RT sebagai bahan pendidikan politik	31	Inventarisasi data-data kantong pemilih potensial hingga tingkat RT
	Peningkatan fasilitasi pendidikan politik terhadap seluruh <i>stakeholder</i>	32	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat
		33	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah
		34	Penguatan kapasitas kelembagaan partai politik

		35 Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu
	Perwujudan Etika dan Budaya Politik	36 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik
	Pemantapan Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	37 Peningkatan kehidupan demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
	Penguatan regulasi dan tata kelola pembinaan ormas	38 Penyusunan skema pembinaan organisasi kemasyarakatan
	Peningkatan akurasi data Organisasi Kemasyarakatan dan perluasan informasi tentang regulasi Organisasi Kemasyarakatan	39 Inventarisasi data Organisasi Kemasyarakatan yang belum terdaftar
	Peningkatan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan	40 Penguatan kapasitas dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Perwujudan tertibnya organisasi kemasyarakatan	41 Pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
	Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	42 Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan
	Pemenuhan mutu ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	43 Penyusunan data pelaku ekonomi yang berpotensi dalam mendukung ketahanan ekonomi di daerah
		44 Penataan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)
		45 Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Ketahanan Budaya

	Penguatan analisis ketahanan ekonomi dan pembinaan sosial dan budaya kepada aparaturnya dan masyarakat	46	Penguatan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dampak kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat
		47	Penguatan data kelembagaan FKUB dan BNNK
		48	Penyampaian rencana aksi P4GN dan Ketahanan Budaya
	Peningkatan mutu ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	49	Peningkatan hasil monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas ketahanan ekonomi
		50	Peningkatan pembinaan dan penyuluhan FKUB dan P4GN kepada aparaturnya dan masyarakat
		51	Implementasi Rencana Aksi P4GN dan Ketahanan Budaya
	Perwujudan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	52	Akurasi analisis ketahanan ekonomi terhadap kebijakan pemerintah
		53	Penguatan peran FKUB dan BNNK dalam kehidupan masyarakat
		54	Penyelesaian rencana aksi P4GN dan Ketahanan Budaya
	Pemantapan Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	55	Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara
		56	Peningkatan toleransi antar umat beragama dan penurunan kasus penyalahgunaan narkoba

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Uraian Program

Pada bagian ini dikemukakan rencana program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output, secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan 6 (enam) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

4.2 Uraian Kegiatan

Pada bagian ini dikemukakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output, secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan 13 (tiga belas) kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
13. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

4.3 Uraian Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output, secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan 40 (empat puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

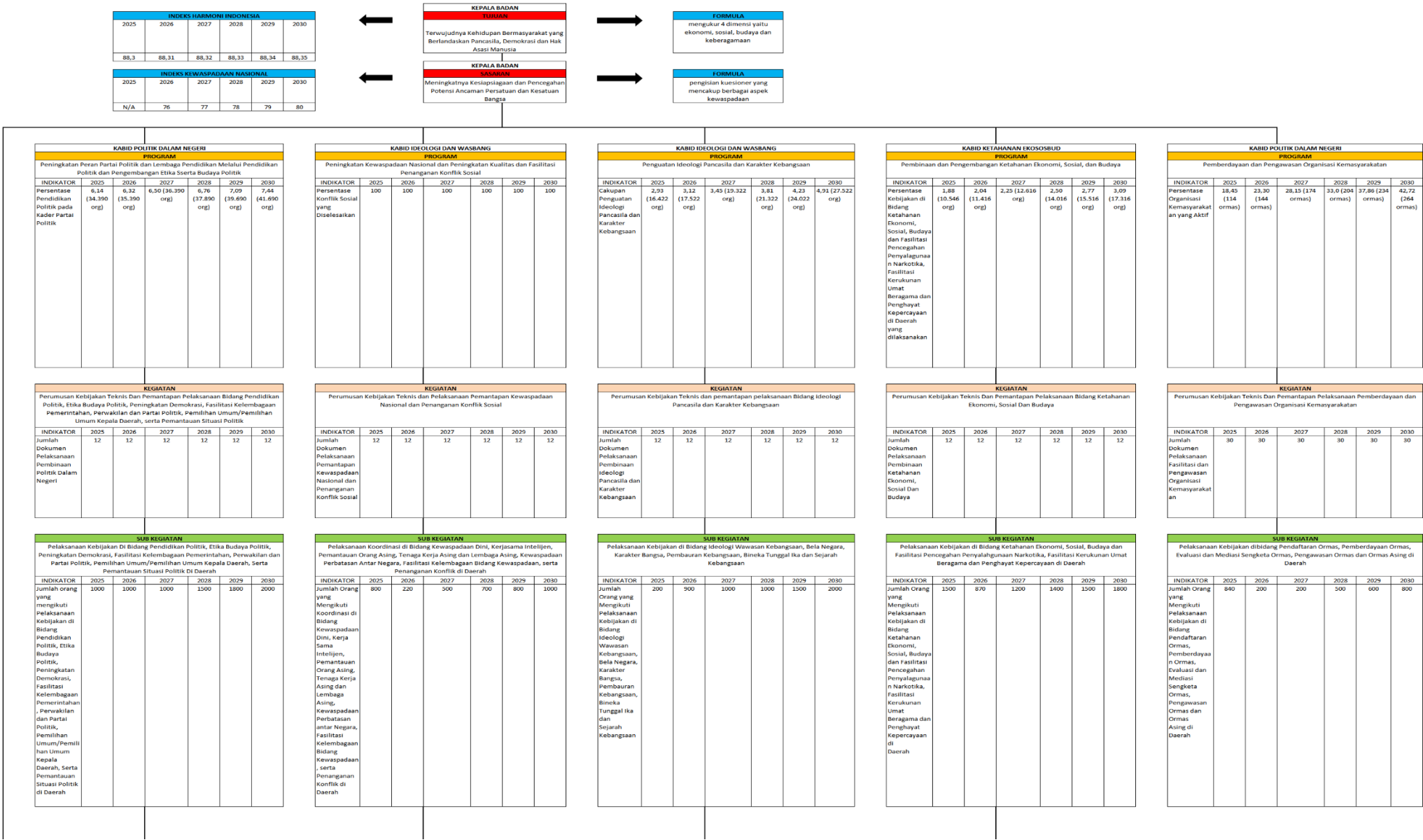
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
11. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
12. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
13. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
14. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
21. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
26. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
32. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
33. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
34. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
35. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
36. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
37. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
38. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

39. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
40. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun secara rinci terkait rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu pendanaan indikatif sebagaimana pada tabel berikut :

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI KARTANEGARA



CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI KARTANEGARA

SUB KEGIATAN						
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21	21	21	21	21	21

SUB KEGIATAN						
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik,						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24	20	24	35	40	50

SUB KEGIATAN						
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50	30	50	50	60	75

SUB KEGIATAN						
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	700	200	800	1000	1200	1500

SUB KEGIATAN						
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35	20	35	35	50	60

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIS PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	77	78	79	80	81

SEKRETARIS KEGIATAN Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6

SEKRETARIS KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	20	20	20	20	20

KASUB.BAG UMUM KEPEGAWAIAN KEGIATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3

KASUB.BAG UMUM KEPEGAWAIAN KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4	4	4	4	4	4

SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3

SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	900	900	900	900	900	900

SUB KEGIATAN Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	143	0	143	0	143	0

SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	3	3	3	3	3

SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75	75	75	90	90	100

SUB KEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semeste r SKPD	18	18	18	18	18	18

SUB KEGIATAN Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	3	3	3	3	3	3

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI KARTANEGARA

SUB KEGIATAN						
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN						
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1	1

SUB KEGIATAN						
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI KARTANEGARA

KASUB.BAG UMUM KEPEGAWAIAN						
KEGIATAN						
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6
SUB KEGIATAN						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	4	4
SUB KEGIATAN						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	29	29	29	29	29	29
SUB KEGIATAN						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	38	38	38	38	38	38
KASUB.BAG UMUM KEPEGAWAIAN						
KEGIATAN						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100	100
SUB KEGIATAN						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	1	0	0	0
SUB KEGIATAN						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	1	0	0	0
SUB KEGIATAN						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	18	18	15	24	22
KASUB.BAG UMUM KEPEGAWAIAN						
KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12
SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	12
SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24	12	12	12	12	12
SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	12	12	12	12	12
KASUB.BAG UMUM KEPEGAWAIAN						
KEGIATAN						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100
SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	10	30	30	30	30	30
SUB KEGIATAN						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	40	40	40	40	40
SUB KEGIATAN						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	43	43	43	43	43	43

CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KUTAI KARTANEGARA

SUB KEGIATAN						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	5	5	5	5	5

SUB KEGIATAN						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600	600	600	620	650	680

SUB KEGIATAN						
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2500	2500	2700	2900	3100	3500

SUB KEGIATAN						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	2	2	2	2	2

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Rencana Strategis PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
Meningkatnya Stabilitas Kondusifitas Daerah	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia				Indeks Harmoni Indonesia		
		Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Indeks Kewaspadaan Nasional		
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik		Persentase pendidikan politik pada partai politik dan lembaga pendidikan	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	

				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
					Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	

					Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
					Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	

					Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/OUTC OME/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKAT OR OUTCOM E/OUTP UT	SATUAN	BAS ELIN E TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KE T.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UNSUR PEMERINTAH AN UMUM																
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika Sserta Budaya Politik	Persenta se pendidik an politik pada partai politik dan lembaga pendidik an	Persen	100	100	4.481.992.000	100	4.002.304.000	100	4.252.304. 000	100	4.602.304. 000	100	5.052.304. 000	100	5.452.304. 000	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili	Jumlah Dokume n Pelaksan aan Pembina an Politik Dalam Negeri	dokumen / bulan	12	12	4.481.992.000	12	4.002.304.000	12	4.252.304. 000	12	4.602.304. 000	12	5.052.304. 000	12	5.452.304. 000	

han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	34.390	1.000	650.000.000	1.000	500.000.000	1.000	650.000.000	1.500	900.000.000	1.800	1.200.000.000	2.000	1.500.000.000	

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	21	21	3.581.992.000	21	3.352.304.000	21	3.352.304.000	21	3.352.304.000	21	3.352.304.000	21	3.352.304.000		
--	---	-------	----	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	--	--

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitorin g, Evaluasi dan Pelapora n di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningka tan Demokra si, Fasilitasi Kelembag aan Pemerint ahan, Perwakila n dan Partai Politik, Pemiliha n Umum/P emilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemanta uan Situasi Politik di Daerah	Laporan	638	24	250.000.000	20	150.000.000	24	250.000.000	35	350.000.000	40	500.000.000	50	600.000.000	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Persen	2,72 (15.222 org)	2,93 (16.422 org)	6.050.000.000	3,12 (17.522 org)	5.560.000.000	3,45 (19.322 org)	6.000.000.000	3,81 (21.322 org)	6.700.000.000	4,23 (24.022 org)	7.200.000.000	4,91 (27.522 org)	7.800.000.000	

	Kebangs aan															
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	dokumen /bulan	12	12	6.050.000.000	12	5.560.000.000	12	6.000.000.000	12	6.700.000.000	12	7.200.000.000	12	7.800.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	11.007	2.000	5.550.000.000	900	5.400.000.000	1.000	5.700.000.000	1.000	6.100.000.000	1.500	6.500.000.000	2.000	7.000.000.000	

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	5.515	700	500.000.000	200	160.000.000	800	300.000.000	1.000	600.000.000	1.200	700.000.000	1.500	800.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	Persen	1,79 (10.046 org)	1,88 (10.546 org)	1.502.429.000	2,04 (11.416 org)	800.000.000	2,25 (12.616 org)	1.300.000.000	2,50 (14.016 org)	1.800.000.000	2,77 (15.516 org)	2.000.000.000	3,09 (17.316 org)	2.200.000.000	

	Penghay at Kepercay aan di Daerah yang dilaksan akan															
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokume n Pelaksan aan Pembina an Ketahan an Ekonomi , Sosial Dan Budaya	dokumen /triwulan	5	12	1.502.429.000	12	800.000.000	12	1.300.000. 000	12	1.800.000. 000	12	2.000.000. 000	12	2.200.000. 000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikut i Pelaksan aan Kebijaka n di Bidang Ketahana n Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegah an Penyalag unaan Narkotika	orang	10.6 46	1.500	1.202.429.000	870	600.000.000	1.200	1.000.000.0 00	1.400	1.400.000.0 00	1.500	1.500.000.0 00	1.800	1.600.000.0 00	

	, Fasilitasi Kerukun an Umat Beragam a dan Penghaya t Kepercay aan di Daerah															
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	106	35	300.000.000	20	200.000.000	35	300.000.000	35	400.000.000	50	500.000.000	60	600.000.000	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Persentase Organisasi	Persen	13,59 (84	18,45 (114 ormas)	700.000.000	23,30 (144 ormas)	200.000.000	28,15 (174 ormas)	500.000.000	33,0 (204 ormas)	600.000.000	37,86 (234 ormas)	700.000.000	42,72 (264 ormas)	800.000.000	

Organisasi Kemasyarakatan	Kemasya rakatan yang Aktif		orm as)													
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas dan Pengawasan Organisasi Kemasya rakatan	dokumen	252	30	700.000.000	30	200.000.000	30	500.000.000	30	600.000.000	30	700.000.000	30	800.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikut i Pelaksanaan Kebijaksanaan di Bidang Pendaftaran Ormas, Ormas, Pemberd ayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas an Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	252	840	700.000.000	200	200.000.000	500	500.000.000	500	600.000.000	600	700.000.000	800	800.000.000	

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	100	100	2.200.000.000	100	1.250.000.000	100	2.257.745.000	100	2.574.197.000	100	3.491.220.000	100	4.429.231.000	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen /bulan	12	12	2.200.000.000	12	1.250.000.000	12	2.257.745.000	12	2.574.197.000	12	3.491.220.000	12	4.429.231.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa	orang	2.450	800	700.000.000	220	250.000.000	500	757.745.000	700	1.074.197.000	800	1.491.220.000	1000	1.929.231.000	

Konflik Daerah	di daan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	169	50	1.500.000.000	30	1.000.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	60	2.000.000.000	75	2.500.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,34	76	12.601.298.405	77	11.735.028.605	78	13.140.811.917	79	12.677.123.703	80	13.571.123.802	81	13.762.124.267	
Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	6	750.000.000	6	400.000.000	6	500.000.000	6	740.000.000	6	1.060.000.000	6	1.190.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	3	3	450.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	200.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	

Perangkat Daerah	Perangka t Daerah															
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD dan lapaoran hasil koordina si penyusu nan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	70.000.000	3	150.000.000	3	200.000.000	3	230.000.000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	320.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	berita acara	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	80.000.000	1	120.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	20	20	8.374.176.479	20	8.926.686.502	20	8.926.686.734	20	8.936.686.520	20	8.951.686.619	20	8.959.687.084	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	900	900	8.208.536.479,00	900	8.761.046.502,00	900	8.761.046.733,88	900	8.761.046.520,33	900	8.761.046.619,42	900	8.761.047.083,92	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil	laporan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	

	koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD															
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester SKPD	laporan	18	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	18	115.640.000,00	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	38.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen	3	3	115.800.000	3	115.800.000	3	115.800.000	3	145.800.000	3	170.800.000	3	200.800.000	

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	laporan	3	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	3	40.800.000,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	4	4	168.552.000	4	50.000.000	4	220.000.000	4	100.000.000	4	400.000.000	4	220.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	paket	143	143	148.552.000,00	-	-	143	150.000.000,00	-	-	143	200.000.000,00	-	-	

	Kelengka pan															
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikut i Sosialisas i Peratura n Perundan g-Undanga n	orang	75	75	20.000.000,00	75	50.000.000,00	75	70.000.000,00	90	100.000.000,00	90	200.000.000,00	100	220.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administ rasi Umum Perangka t Daerah	layanan	6	6	1.218.393.000	6	790.000.000	6	1.298.393.000	6	1.388.393.000	6	1.500.393.000	6	1.592.393.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor yang Disediaka n	paket	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	12.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang disediaka n	paket	29	29	50.000.000,00	29	100.000.000,00	29	100.000.000,00	29	120.000.000,00	29	150.000.000,00	29	180.000.000,00	

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	38	38	25.000.000,00	38	35.000.000,00	38	35.000.000,00	38	50.000.000,00	38	60.000.000,00	38	70.000.000,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	paket	5	5	188.150.000,00	5	50.000.000,00	5	188.150.000,00	5	200.150.000,00	5	210.150.000,00	5	220.150.000,00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	350	600	900.243.000,00	600	550.000.000,00	600	900.243.000,00	620	920.243.000,00	650	950.243.000,00	680	980.243.000,00	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	2500	2500	50.000.000,00	2500	50.000.000,00	2700	70.000.000,00	2900	90.000.000,00	3100	120.000.000,00	3500	130.000.000,00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100	100	568.360.000	100	100.000.000	100	1.054.688.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	unit	1	1	168.360.000,00	1	-	1	634.688.000,00	1	-	1	-	1	-	

Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan															
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1	320.000.000,00	1	-	1	320.000.000,00	1	-	1	-	1	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	402	4	80.000.000,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00	15	150.000.000,00	24	200.000.000,00	22	250.000.000,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	605.856.926	12	932.542.103	12	755.244.183	12	756.244.183	12	758.244.183	12	759.244.183	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	laporan	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	2.000.000,00	12	4.000.000,00	12	5.000.000,00	

	Surat Menyurat															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	24	24	224.073.518,00	12	224.084.183,00	12	224.084.183,00	12	224.084.183,00	12	224.084.183,00	12	224.084.183,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	24	24	380.783.408,00	12	707.457.920,00	12	530.160.000,00	12	530.160.000,00	12	530.160.000,00	12	530.160.000,00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	800.160.000	100	420.000.000	100	270.000.000	100	460.000.000	100	530.000.000	100	590.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	2	10	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	80.000.000,00	30	90.000.000,00	30	100.000.000,00	

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	unit	9	15	110.000.000,00	40	110.000.000,00	40	110.000.000,00	40	120.000.000,00	40	130.000.000,00	40	140.000.000,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	unit	43	43	40.000.000,00	43	40.000.000,00	43	40.000.000,00	43	60.000.000,00	43	80.000.000,00	43	100.000.000,00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit gedung	2	2	580.160.000,00	2	200.000.000,00	2	50.000.000,00	2	200.000.000,00	2	230.000.000,00	2	250.000.000,00	
TOTAL					27.535.719.405,00		23.547.332.605,00		27.450.860.916,88		28.953.624.703,33		32.014.647.802,42		34.443.659.266,92	

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari tujuan hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk menciptakan situasi daerah yang kondusif dengan penekanan pada deteksi dini pencegahan konflik. Dengan demikian program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang turut mendukung Program Dedikasi yaitu Program RT Ku-Terbaik sebagai berikut :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pendukung Program Unggulan/Dedikasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Program RT Ku-Terbaik
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk

memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	nilai	N/A	N/A	76	77	78	79	80	

No	Sasaran Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Potensi Ancaman Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks Kewaspadaan Nasional	alat ukur yang digunakan untuk menilai kesiapsiagaan bangsa Indonesia dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah ancaman terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	Kesbangpol	Pengukuran ini melibatkan pengisian kuesioner yang mencakup berbagai aspek kewaspadaan, serta dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah dengan melibatkan berbagai pihak seperti ASN, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa. IKN dirancang untuk memberikan gambaran kondisi daerah, mengidentifikasi kerawanan, dan menjadi dasar untuk penyusunan strategi pencegahan serta kebijakan yang lebih efektif	Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja kunci yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja perangkat daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Persen	6,84	6,14	6,32	6,50	6,76	7,09	7,44	
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	5,22	4,81	5,17	5,70	6,31	7,06	8,00	

Tabel 4.6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:								
	Indikator Tujuan:								
1	Indeks Harmoni Indonesia	88,29	88,30	88,31	88,32	88,33	88,34	88,35	88,35
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):								
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	N/A	76	77	78	79	80	80
II	INDIKATOR PROGRAM:								
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,34	76	77	78	79	80	81	81
2	Persentase pendidikan politik pada partai politik dan lembaga pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,72 (15.222 org)	2,93 (16.422 org)	3,12 (17.522 org)	3,45 (19.322 org)	3,81 (21.322 org)	4,23 (24.022 org)	4,91 (27.522 org)	4,91 (27.522 org)
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	1,79 (10.046 org)	1,88 (10.546 org)	2,04 (11.416 org)	2,25 (12.616 org)	2,50 (14.016 org)	2,77 (15.516 org)	3,09 (17.316 org)	3,09 (17.316 org)
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	13,59 (84 ormas)	18,45 (114 ormas)	23,30 (144 ormas)	28,15 (174 ormas)	33,0 (204 ormas)	37,86 (234 ormas)	42,72 (264 ormas)	42,72 (264 ormas)
6	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
III	INDIKATOR KEGIATAN:								
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12	12	12	12	12	12	12	12

3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12	12	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5	12	12	12	12	12	12	12
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	252	30	30	30	30	30	30	402

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Rencana Strategis bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Strategis adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025 – 2029 meliputi : 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, 2) Merumuskan indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgent dalam peningkatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pelaksanaan Rencana Strategis, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode perencanaan.
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dilaksanakan secara terintegrasi dan selaras dengan RPJMD, rencana Pembangunan Nasional, kebijakan Pemerintah Pusat, serta rencana pembangunan sektor dan Perangkat Daerah lainnya.
3. Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan kinerja, yang menekankan pada pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta hasil (outcome) yang terukur dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan Rencana Strategis dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
6. Pelaksanaan Rencana Strategis dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

7. Rencana Strategis dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan Kebijakan Nasional maupun daerah, kondisi strategis, atau keadaan tertentu yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dan Evaluasi

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam rangka memperkuat NKRI.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Rencana Strategis merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

